

Pantura Jawa Rawan Bencana

[JAKARTA] Kawasan pantai utara (pantura) Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, sangat rawan bencana abrasi, rob, gelombang pasang, serta pencemaran sungai dan laut. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan di wilayah ini menjadi fokus pembangunan dengan konsep *integrated coastal and ocean management*.

Menurut Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan, Syamsul Maarif, di Jakarta, Senin (4/8), pesisir utara Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang padat dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi.

"Namun, di sisi lain, muncul dampak negatif dari aktivitas di wilayah pesisir ini. Selain kondisi lingkungan pesisir utara Jateng yang semakin menurun, juga terdapat kemiskinan pada sentra-sentra nelayan," ujarnya.

Syamsul mengatakan, KP3K sejak tahun 2000 telah melaksanakan sejumlah program di wilayah pesisir utara Jateng yang ditujukan untuk menyinergikan upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem wilayah.

Program pemberdayaan masyarakat ini telah mencakup 289 kabupaten/kota berpesisir, termasuk di kawasan pantura Jateng, seperti Pekalongan, Tegal, Pemalang, dan Batang.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan di wilayah ini meliputi penyaluran dana ekonomi produktif, antara lain melalui koperasi Swamitra Mina, kedai pesisir, dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyinkronkan program pemberdayaan dan upaya perbaikan lingkungan, pada 2006 pihaknya meluncurkan program PLBPM (Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat). Program ini untuk memperbaiki lingkungan permukiman masyarakat pesisir dan nelayan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Kawasan Konservasi

Pada 2006, PLBPM dilaksanakan pada 20 kabupaten/kota, tahun 2007 pada 20 lokasi, dan tahun 2008 di 28 lokasi. Sejak perencanaan hingga pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pihaknya juga mengembangkan program Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) untuk mendukung upaya terwujudnya 10 juta hektare (ha) kawasan konservasi pada 2010, dan 20 juta ha pada 2020. Menurutnya, program KKLD diamanatkan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan PP 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

[S-26]